

PENDAMPINGAN ADMINISTRATIF DALAM MENDUKUNG LEGALITAS DAN KEMANDIRIAN KOPERASI PRODUSEN ENERGI CAKRAWALA NUSANTARA

Dela Maulini¹, Eunike Bintang Kasih Irawan², Siti Rohmah³, Gill Yusuf Anak
Agung⁴, Eka Dasra Viana⁵, Bilal Joko Suratno⁶, Fatqul In'am⁷

dell02dela@apps.ipb.ac.id¹, eunikebintang@apps.ipb.ac.id², stirhmhimarohmah@apps.ipb.ac.id³,
gillyaa125gill@apps.ipb.ac.id⁴, ekadasraviana@apps.ipb.ac.id⁵, bilaljoko@gmail.com⁶,
fatqul987@gmail.com⁷

IPB University^{1,2,3,4,5}, PLN NP UP Tanjung Awar-Awar Tuban⁶, Koperasi Produsen Energi
Cakrawala Nusantara⁷

ABSTRAK

Kegiatan pendampingan administratif pada Koperasi Produsen Energi Cakrawala Nusantara (ECN) bertujuan memperkuat legalitas kelembagaan dan meningkatkan kemandirian tata kelola koperasi. Program ini dilaksanakan melalui observasi, wawancara, diskusi, serta pendampingan teknis kepada pengurus dalam penyusunan dan pengurusan dokumen legal seperti NPWP, NIB, PKP, serta pendaftaran koperasi pada Online Data System (ODS). Selain itu, dilakukan penyusunan dokumen administrasi internal berupa format kwitansi, invoice, notulensi rapat, buku panduan produksi biomassa, pencatatan inventaris, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) kandang dan biomassa. Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan tertib administrasi, kemampuan pengurus dalam mengelola dokumen secara mandiri, dan terbentuknya sistem pencatatan yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan data awal, belum adanya format baku, serta hambatan teknis selama proses daring, kegiatan ini berhasil menciptakan sistem administrasi yang efektif dan berkelanjutan. Pendampingan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Kemandirian, Koperasi, Legalitas Kelembagaan, Pendampingan Administrasi, Tata Kelola.

ABSTRACT

Administrative assistance activities at the Koperasi Produsen Energi Cakrawala Nusantara (ECN) aim to strengthen institutional legality and improve the independence of cooperative governance. This program is implemented through observation, interviews, discussions, and technical assistance to the management in the preparation and management of legal documents such as NPWP, NIB, PKP, and cooperative registration in the Online Data System (ODS). In addition, internal administrative documents were prepared, including receipt forms, invoices, meeting minutes, a biomass production guidebook, inventory records, and Standard Operating Procedures (SOP) for barns and biomass. The results of the assistance showed improvements in administrative order, the ability of administrators to manage documents independently, and the establishment of a more transparent and accountable recording system. Despite facing challenges such as limited initial data, the absence of standardized formats, and technical obstacles during the online process, this activity successfully created an effective and sustainable administrative system. This assistance is expected to be the first step in building professional, transparent, and technology-adaptive cooperative governance.

Keywords: *Independence, Cooperative, Institutional Legality, Administrative Assistance, Governance.*

PENDAHULUAN

Koperasi sebagai entitas ekonomi kolektif memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip kekeluargaan dan partisipasi aktif. Dalam konteks koperasi produsen energi, peran ini menjadi semakin penting mengingat kebutuhan akan energi yang berkelanjutan

dan ramah lingkungan terus meningkat di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi koperasi khususnya dalam segmen energi adalah terkait dengan legalitas dan kemandirian operasional yang mampu menjamin kesinambungan usaha dan perlindungan anggota dari risiko hukum dan finansial (Irawansah et al. 2025).

Pendampingan administratif merupakan salah satu bentuk dukungan utama yang dapat membantu koperasi menjalankan tata kelola yang baik dan memenuhi aspek legalitas sesuai regulasi yang berlaku. Pendampingan ini meliputi proses pembinaan dan pengawasan dalam hal pengelolaan dokumen legal, pemenuhan standar operasional prosedur (SOP), hingga perbaikan sistem administrasi yang bersifat digitalisasi anggota dan penguatan struktur organisasi koperasi (Anjani et al. 2023). Dengan pendampingan yang tepat, Koperasi Produsen Energi Cakrawala Nusantara (ECN) dapat meningkatkan kualitas tata kelola sehingga tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu menguatkan kemandirian finansial dan operasional.

Urgensi pendampingan administratif dalam koperasi sangat nyata, terutama dalam meningkatkan kapasitas pengurus untuk mengelola tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai peraturan. (Restiany et al. 2025) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI menyatakan bahwa program pendampingan koperasi modern yang diterapkan melalui pendekatan berbasis masalah mampu meningkatkan efektivitas manajemen dan tata kelola koperasi. Pendampingan ini dilakukan melalui tahapan pra-pendampingan, pendampingan, dan pasca pendampingan secara sistematis sehingga pengurus mendapatkan pemahaman mendalam tentang aspek legalitas dan cara mengakses pembiayaan secara legal dan berkelanjutan. Model pendampingan yang inklusif ini memberi kesempatan bagi koperasi untuk memperbaiki kinerja administratif, mendorong transparansi, dan menguatkan kemandirian usaha koperasi secara menyeluruh.

Regulasi pemerintah seperti PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan tata kelola koperasi juga memperkuat kerangka hukum dan tata kelola koperasi yang sehat, inklusif, serta berbasis partisipasi anggota secara maksimal (BPK 2021). Hal tersebut mensyaratkan koperasi untuk menjaga prinsip koperasi dan menjalankan fungsi pengawasan secara internal untuk mengawal keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, pendampingan administrasi bukan hanya soal pemenuhan dokumen, melainkan pembinaan berkelanjutan agar koperasi mampu mandiri dan berdaya saing di pasar energi.

Koperasi Produsen ECN sebagai bagian dari badan usaha yang bergerak di sektor energi memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia. Dengan pendampingan administratif yang sistematis, koperasi ini diharapkan mampu menata ulang sistem administrasi, memperkuat legalitas, serta mendukung kemandirian koperasi baik secara internal maupun dalam jaringan ekonomi yang lebih luas (Anjani et al. 2023). Kemandirian ini penting agar koperasi dapat berdiri kokoh tanpa ketergantungan eksternal yang berlebihan dan mampu mengoptimalkan manfaat sosial ekonomi kepada anggotanya (Irawansah et al. 2025).

Penelitian dan pengembangan pendampingan administratif yang tepat sasaran dengan berbasis pada kebutuhan dan potensi riil koperasi menjadi hal yang krusial. Proses pendampingan yang meliputi sosialisasi, pelatihan, digitalisasi, dan evaluasi secara berkelanjutan dapat mempercepat kemajuan koperasi produsen energi untuk mencapai legalitas yang jelas, tata kelola yang baik, serta kemandirian yang berkelanjutan (Istikomah et al. 2025). Dengan demikian, peran pendamping administratif bukan hanya sebagai fasilitator, melainkan sebagai agen perubahan yang dapat menuntun koperasi menuju pengelolaan yang profesional dan terpercaya.

Melalui pendekatan inilah jurnal ini akan mengkaji bagaimana proses pendampingan administratif yang efektif dapat mendukung legalitas dan kemandirian Koperasi Produsen ECN, sebagai upaya pemberdayaan koperasi energi yang berkelanjutan dan berkontribusi nyata bagi ekonomi nasional dan lingkungan hidup.

METODE

Pendampingan administratif dilaksanakan sejak bulan September hingga Oktober 2025 di Koperasi Produsen ECN yang bertempat di Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kegiatan ini telah diikuti oleh pengurus Koperasi Produsen ECN yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara koperasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melalui kegiatan pendampingan. Kegiatan dilakukan dengan menggali proses, tantangan, dan tanggapan dari pengurus mengenai sistem legalitas dan administrasi untuk koperasi. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi dan wawancara secara langsung dengan sekretaris koperasi guna mengidentifikasi kebutuhan koperasi.

Selanjutnya, dilakukan pendampingan teknis kepada pengurus untuk membantu penyusunan dokumen administrasi dan perihal legalitas koperasi. Proses pendampingan teknis ini berupa penyusunan dokumen administrasi, pengelolaan data, serta pemenuhan legalitas kelembagaan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengurus koperasi mengenai konsep tata kelola administrasi koperasi yang baik dan mendorong kemandirian koperasi dalam pengelolaan administrasi dan pemenuhan aspek legalitas. Luaran dari kegiatan pendampingan ini berupa dokumen legal, format dan sistem administrasi internal, buku panduan produksi Biomassa, SOP operasional, serta publikasi ilmiah sebagai bentuk dokumentasi kegiatan pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Koperasi

Pada tahun 2024, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PLTU Tanjung Awar-Awar yang berkolaborasi dengan IPB University, dibentuklah Kandang Komunal Satria Padu sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah Jenu, Kabupaten Tuban. Inisiatif ini awalnya dikenal dengan nama Korporasi Kerakyatan “Satria Padu”. Program tersebut bertujuan untuk memfasilitasi para peternak melalui model kandang komunal untuk meningkatkan efisiensi usaha ternak, kesehatan hewan, akses pasar, ketersediaan pakan, serta pengelolaan limbah menjadi produk bernilai guna yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan (Firnanda 2025).

Memasuki tahun 2025, Kandang Komunal Satria Padu mengalami proses transformasi kelembagaan dari komunitas peternak menjadi sebuah koperasi. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh legalitas formal, memperluas akses kemitraan, serta membuka peluang pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan. Pada bulan Agustus 2025, terbentuklah Koperasi Produsen ECN sebagai hasil transformasi tersebut. Koperasi ECN menjalankan tiga lini bisnis utama yang dikembangkan secara bertahap, meliputi (1) pengelolaan ternak sapi, kambing, dan domba melalui sistem kandang komunal; (2) produksi paving berbahan dasar limbah abu terbang (FABA) dari PLTU; dan (3) pengolahan limbah pertanian berupa bonggol jagung menjadi biomassa untuk mendukung transisi energi bersih.

Sebagai entitas yang baru berdiri, Koperasi ECN masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penguatan aspek kelembagaan dan administrasi. Pada fase awal pembentukannya, koperasi ini baru memiliki Akta Pendirian dan Surat Keputusan (SK) Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai dasar legalitas awal. Sementara itu, berbagai dokumen penting lain yang diperlukan untuk

menunjang operasional koperasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan sistem administrasi keuangan dan pelaporan belum tersedia secara lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa Koperasi Produsen ECN masih berada pada tahap awal pengembangan kelembagaan, sehingga kapasitas administrasi dan manajemen perlu diperkuat agar koperasi mampu menjalankan bisnisnya secara legal, profesional, dan mandiri.

Proses Pendampingan

Kegiatan pendampingan pada prosesnya, melaksanakan langkah-langkah awal agar Koperasi Produsen ECN siap beroperasi dari segi administrasi. Transisi dari kelompok ternak ke koperasi membutuhkan pertemuan awal dengan para anggota untuk berdiskusi tentang fungsi dan manfaat dari koperasi, identifikasi anggota dan potensi, dan jenis koperasi yang akan dilaksanakan. Koperasi Energi Cakrawala Nusantara dalam kasus ini, telah ditentukan sebagai koperasi produsen yang berfokus pada peternakan dan biomassa. Anggota yang sebelumnya merupakan anggota kelompok ternak juga diberikan edukasi berupa penetapan tujuan dan manfaat koperasi agar kedepannya, transformasi ini bisa tertanam pada anggota koperasi.

Proses selanjutnya adalah penyusunan dokumen legalitas dalam pendirian koperasi. Di awal berdirinya Koperasi Energi Cakrawala Nusantara, baru memiliki Akta Pendirian dan Surat Keputusan (SK) dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Koperasi pada umumnya memerlukan dokumen-dokumen dan dalam hal ini, pendampingan dalam pembuatan dokumen legalitas seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB) diperlukan untuk menunjang operasional koperasi agar dapat beroperasi secara resmi. Online Data System (ODS) untuk koperasi juga diperlukan. Online Data Sistem Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut ODS Koperasi dan UKM adalah sistem aplikasi pendataan Koperasi dan UKM yang dapat diakses secara online oleh para pihak yang berkepentingan yang ada pada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Bagian Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pembuatan struktur organisasi dan neraca keuangan juga dilakukan agar kepengurusan dari segi sumber daya manusia dan keuangan bisa berjalan sesuai prosedur yang ada.

Koperasi yang baru berdiri juga harus didampingi dalam hal pelaksanaan operasional. Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) untuk semua aspek kerja diperlukan untuk kelancaran operasional. Format invoice penjualan biomassa, kwitansi koperasi, notulensi rapat, invoice pembayaran bahan baku, pendataan produksi hasil, penyetoran bahan baku dan presensi setiap rapat perlu dibuat dan dilaksanakan sesuai standar operasional koperasi. Formulir penting seperti pendataan kedatangan bahan baku untuk biomassa dan yang lainnya harus terdata dan masuk ke pendataan khusus produksi.

Hasil Pendampingan

Kegiatan pendampingan administrasi pada Koperasi Produsen ECN berfokus pada dua pilar utama, yaitu penguatan aspek legalitas kelembagaan dan pengembangan aspek kemandirian tata kelola koperasi. Kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun fondasi kelembagaan yang kuat, transparan, dan berkelanjutan.

1. Aspek Legalitas Kelembagaan

Pendampingan pada aspek legalitas bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional koperasi memiliki dasar hukum yang sah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada tahap ini, kegiatan difokuskan pada penyusunan dan pengurusan dokumen legal yang menjadi prasyarat keberadaan koperasi secara formal.

Beberapa capaian utama pendampingan pada aspek legalitas meliputi:

a. Pemenuhan Dokumen Legalitas Usaha

Proses administrasi mencakup penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Nomor Induk Berusaha (NIB), serta Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Keempat dokumen ini menjadi landasan hukum bagi koperasi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi secara resmi sesuai regulasi pemerintah.

b. Pendaftaran dan Pengisian Data Koperasi pada Sistem ODS Kementerian Koperasi dan UKM

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan koperasi terdaftar dalam sistem digital nasional, sehingga memperoleh pengakuan sebagai badan hukum aktif serta memiliki akses terhadap fasilitas pembinaan dan program pemberdayaan dari pemerintah.

c. Penyusunan Dokumen Hukum dan Perjanjian Kerja Sama

Pendampingan mencakup penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra penyedia bahan baku biomassa. Dokumen ini digunakan sebagai dasar kesepahaman kerja sama dan memperjelas hak serta kewajiban koperasi dalam menjalin kemitraan strategis, terutama dalam rencana kerja sama dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI).

2. Aspek Kemandirian Koperasi

Pendampingan pada aspek kemandirian difokuskan pada pembentukan sistem administrasi internal yang efektif, terstandar, dan dapat dijalankan secara mandiri oleh pengurus serta anggota koperasi tanpa ketergantungan pada pihak eksternal. Upaya ini berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan profesionalisme manajemen koperasi.

Beberapa capaian utama pendampingan pada aspek kemandirian meliputi:

a. Penyusunan Format dan Sistem Administrasi Internal

Format administrasi dirancang untuk mendukung efektivitas dan kelancaran operasional koperasi. Dokumen yang disusun meliputi format kwitansi, invoice pembelian dan penjualan, notulensi rapat, surat delegasi tugas, daftar presensi rapat, serta formulir penerimaan bahan baku, hasil produksi biomassa, dan formulir penyetoran biomassa. Penyusunan dokumen administratif ini menjadi dasar terbentuknya sistem pencatatan yang terstruktur, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan audit internal secara akurat dan akuntabel.

Masing-masing dokumen dapat memudahkan pengurus untuk melengkapi administrasi Koperasi Produsen Energi Cakrawala Nusantara dalam proses bisnis yang sedang dijalankan. Kwitansi yang dirancang dapat digunakan sebagai bukti penerimaan maupun pembayaran atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh koperasi, baik dari anggota maupun pihak eksternal, yang akan memudahkan proses pencatatan dan meningkatkan transparansi koperasi. Invoice Pembelian dan Penjualan merupakan dokumen yang mencatat transaksi pembelian bahan baku atau penjualan produk koperasi dan membantu rekonsiliasi data transaksi saat audit. Dokumen notulensi rapat yang berisi ringkasan rapat, meliputi agenda, pembahasan dan keputusan yang disepakati dan lembar daftar hadir dokumen notulensi dapat menjadi arsip resmi hasil rapat koperasi. Surat delegasi tugas digunakan sebagai dokumen resmi menyatakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pengurus kepada anggota atau pihak tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu dan memberikan kejelasan peran, wewenang, dan tanggung jawab. Formulir Penerimaan Bahan Baku digunakan untuk menerima bahan baku dari pemasok atau anggota sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan kehilangan bahan baku. Formulir hasil produksi biomassa digunakan mencatat hasil proses produksi biomassa dan

memantau kinerja dan efisiensi proses produksi dalam periode tertentu. Formulir penyetoran biomassa digunakan sebagai dokumen pencatatan penerimaan biomassa untuk meminimalkan risiko kesalahan pendataan hasil produksi yang telah dikirim kepada konsumen.

b. Penyusunan Buku Panduan Produksi Biomassa

Penyusunan buku panduan bertujuan menyediakan pedoman teknis bagi anggota koperasi dalam melaksanakan proses produksi biomassa berbahan baku limbah pertanian. Dokumen ini mendukung proses standarisasi operasional serta memperkuat mekanisme alih pengetahuan antaranggota.

c. Pencatatan Inventaris dan Pengelolaan Aset Koperasi

Pendampingan mencakup penerapan sistem pencatatan inventaris untuk mendokumentasikan aset yang dimiliki koperasi, baik berupa peralatan produksi maupun fasilitas penunjang. Sistem inventaris yang tertata menjadi dasar bagi pengelolaan aset yang efisien, transparan, dan akuntabel.

d. Penyusunan dan Desain SOP Operasional

SOP disusun untuk memastikan seluruh kegiatan operasional koperasi berjalan dengan konsisten dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP berfungsi sebagai pedoman bagi anggota dalam melaksanakan tugas secara mandiri, sekaligus menjadi instrumen pengendalian mutu untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas organisasi. Dalam konteks pengembangan operasional, SOP yang disusun mencakup perbaikan SOP kandang komunal serta penyusunan SOP biomassa sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen produksi dan efisiensi proses usaha koperasi.

e. Penyusunan Company Profile dan Laporan Tahunan

Penyusunan company profile dan laporan tahunan berfungsi sebagai sarana dokumentasi dan media komunikasi kelembagaan. Kedua dokumen ini berperan dalam memperkuat identitas koperasi, meningkatkan profesionalitas kelembagaan, serta menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif antar anggota.

Tantangan

Pendampingan administratif dalam mendukung legalitas dan kemandirian Koperasi Produsen Energi Cakrawala Nusantara menghadapi berbagai tantangan. Dalam penyusunan format dan sistem administrasi internal, pembuatan format dilakukan dari awal tanpa adanya referensi atau contoh baku yang dapat dijadikan acuan. Ketiadaan format standar ini menyebabkan tim pendamping perlu melakukan banyak penyesuaian dan revisi agar hasil yang disusun dapat sesuai dengan kebutuhan koperasi dan prinsip administrasi yang baik.

Pada aspek pemenuhan dokumen legalitas usaha, terdapat beberapa kendala teknis dan administratif. Proses pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengalami hambatan karena website <https://www.pajak.go.id/panduan-registrasi> yang seringkali mengalami gangguan, sehingga proses harus dilakukan dengan mendatangi kantor pajak. Selain itu, meskipun pengurusan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menghadapi kendala berarti, prosesnya menjadi tertunda karena sebagian pengurus koperasi belum memiliki kelengkapan dokumen pribadi yang dibutuhkan. Di sisi lain, laporan keuangan koperasi juga belum sepenuhnya final karena total aset yang dimiliki belum teridentifikasi secara jelas dan akurat mengakibatkan terhambatnya beberapa proses pengurusan dokumen legalitas.

Dalam kegiatan pencatatan inventaris, tantangan muncul karena data inventaris sebelumnya hanya mencakup inventaris kandang, sehingga perlu dilakukan pembaharuan dan kelengkapan data inventaris koperasi secara menyeluruh. Proses ini memerlukan pendataan ulang terhadap seluruh aset yang dimiliki agar tercipta sistem pencatatan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, dalam penyusunan desain Standar Operasional Prosedur (SOP) belum banyak sumber dan referensi yang terkait dari

sumber daring, oleh sebab itu penyusunan SOP bersifat sangat teknis dan membutuhkan panduan langsung dari ahli di lapangan. Proses penyusunan SOP biomassa juga memakan waktu lebih lama karena kompleksitas kegiatan dan perlunya penyesuaian antara teori dan praktik.

Dalam penyusunan buku panduan produksi biomassa, hambatan yang dialami adalah koneksi internet yang tidak stabil yang menghambat pencarian literatur pendukung, serta keterbatasan referensi terbaru yang relevan dengan konteks lokal. Sedangkan pada tahap pembuatan company profile dan laporan tahunan, tantangan yang dihadapi meliputi keterlambatan pengumpulan data yang diperoleh secara bertahap dari berbagai pihak serta ketiadaan format baku yang memperlambat proses penyusunan. Selain itu, laporan tahunan juga menghadapi kendala berupa ketidakjelasan dan inkonsistensi dokumen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terbatasnya informasi pendukung, serta lambatnya penyediaan dokumentasi kegiatan yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian laporan secara keseluruhan.

Implikasi dan Keberlanjutan

Implikasi dari koperasi produsen yang beroperasi dengan efektif sebagai lembaga ekonomi tidak hanya efektif dalam operasional tetapi juga efektif dalam mewujudkan nilai-nilai keanggotaan, pemanfaatan sumber daya yang efisien, dan pemberdayaan masyarakat yang diberlakukan dalam nilai-nilai koperasi. Koperasi produsen yang efektif dalam administrasi dan sistem operasional adalah terciptanya lingkungan administrasi yang tertib dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Tercapainya administrasi yang tertib memungkinkan pencatatan seluruh kegiatan keuangan dan operasional bisa tercatat dengan baik. Sistem operasional yang terstruktur juga mempermudah pencatatan digital, sistem pencatatan inventori dan manajemen keanggotaan koperasi. Administrasi yang rapi mempermudah pengurus dan anggota koperasi dalam pengambilan keputusan bersama yang berbasis data. Dengan sistem yang transparan dan layanan yang efisien, anggota koperasi lebih percaya dan aktif berpartisipasi. Ini berdampak langsung pada peningkatan simpanan, transaksi, dan loyalitas anggota.

Dalam proses keberlanjutan dari administrasi Koperasi Energi Cakrawala Nusantara, beberapa aspek administrasi seperti aspek legalitas dengan pengurusan NPWP, pendampingan dalam pembuatan dokumen legalitas seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB) diperlukan untuk menunjang operasional koperasi agar dapat beroperasi secara resmi. Online Data System (ODS) untuk koperasi untuk bisa beroperasi secara resmi sudah terlaksana dan siap. Aspek kemandirian dari Koperasi Energi Cakrawala Nusantara seperti pembuatan Standard Operational Procedure (SOP) seperti SOP Biomassa dan SOP Kandang Komunal telah dibuat dan siap dioperasikan demi keberlanjutan operasional dari Koperasi Energi Cakrawala Nusantara. Selanjutnya operasional koperasi bergantung pada kemampuan pengurus dan anggota koperasi. Pelatihan administrasi dan digitalisasi pencatatan keuangan menjadi penting agar sistem administrasi dan operasional bisa bertahan. Penerapan prinsip transparansi, kemandirian, dan keadilan menjadi tanggung jawab pengurus dan seluruh anggota koperasi agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan anggotanya.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan administratif pada Koperasi Produsen ECN memberikan dampak positif terhadap peningkatan legalitas dan kemandirian koperasi. Melalui proses identifikasi kebutuhan, penyusunan dokumen legal, dan penerapan format administrasi, koperasi kini memiliki sistem pengelolaan yang lebih tertata dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendampingan ini tidak hanya menghasilkan dokumen resmi seperti NPWP,

NIB, PKP, dan pendaftaran ODS, namun juga membantu pengurus memahami pentingnya ketertiban administrasi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penyusunan SOP operasional dan panduan kerja turut memperjelas alur kegiatan serta tanggung jawab antaranggota. Meskipun terdapat kendala teknis dan keterbatasan sumber daya, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran pengurus terhadap pentingnya tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Dengan dukungan pelatihan lanjutan dan pemanfaatan teknologi digital, koperasi diharapkan mampu mempertahankan kemandirian administrasi sekaligus memperluas potensi pengembangan usaha di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani CP, Septiawati IT, Aziz MuhA. 2023. Pendampingan tata kelola operasional koperasi. *Jurnal Surya*. 5(1):55–62. doi:10.37150/jsu.v5i1.2256.
- [BPK] Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: BPK.
- Firnanda O. 2025. Faktor pendukung dan penghambat motivasi peternak dalam memasuki [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Irawansah D, Ridwan, Ahmad, Muliya KS. 2025. Perspektif hukum: perlindungan dan pemberdayaan koperasi untuk menuju kemandirian koperasi Indonesia. *Journal of Excellence, Humanities and Religiosity*. 2(1):133–143. doi:10.34304/joehr.v2i1.325.
- Istikomah, Hernawati, Muhiban A, Juwita R. 2025. Pendampingan partisipatif strategi efektif manajemen koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*. 5(2):153–158. doi:10.59818/jpm.v5i2.1483.
- [Kemenkop UKM]. 2016. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Restiany D, Irawan D, Supriyadi D, Prayanda IR. 2025. Model pendampingan koperasi dalam upaya akselerasi pencapaian koperasi modern. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*. 16(1):139–148. doi:10.32670/coopetition.v16i1.5211.